

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amin, Rahman, Hukum Pembuktian, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.
- Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Angela Schneeman, The Law of Corporations and Other Business Organizations (5th edn, Delmar Cengage Learning 2010) p. 246.
- Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015). Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, PT Alumni, 2015.
- Hariyanto, 2001. Pertanggungjawaban Direksi PT Dalam Sistem Hukum Perseroan Indonesia, Majalah Mimbar Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Failissement en surseance van betaling), Ctk. Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.
- Marzuki Peter Mahmud. 2013, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Semarang: Genta Publishing, 2013).
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009).

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Siti Soemarti Hartono, Seri Hukum Dagang: Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Ctk. II, Seksi Hukum Dagang FH UGM Bulaksumur, Yogyakarta, 1983

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2015).

Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, Nukilan: Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014).

### **HASIL PENELITIAN**

Ediwarman. Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi). (Medan: Sofmedia, 2015)

Jamaslin James Purba , Seminar : Problematika Permohonan pailit dan PKPU terhadap Developer rumah susun setelah dikeluarkannya SEMA 3 Tahun 2023, Jakarta, 28 September 2024.

Maddenleo Siagian, Disertasi: Asas kepastian hukum dan keadilan proses pembuktian dalam penerapan pembuktian sederhana perkara, 2022, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

### **JURNAL**

Achmadudin Rajab, Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017.

Frank Ching, "Nationality vs ethnic identity", Asian Education and Development Studies, Volume 7 Nomor 2 (2018): 223-233, DOI:10.1108/AEDS-09-2017-0095.

Gerald Partogi Siahaan, Sunarmi, Budiman Ginting, Mahmud Siregar, Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 3, 2024.

Jimmy Simanjuntak, Tinjauan Hukum atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024, Honeste Vivere JOURNAL Vol.33 Issue 1, 2023.

Maddenleo Siagian, Disertasi: Asas kepastian hukum dan keadilan proses pembuktian dalam penerapan pembuktian sederhana perkara, 2022,

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rainer Bauböck, “Epilogue: International Norms for Nationality: An Elusive Goal?”, *Netherlands International Law Review*, Volume 65 Nomor 3 (2018).

Titik Tri Sulistyawati, Eksistensi Doktrin “Piercing The Corporate Veil” Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan Induk Perusahaan, *Jurnal Notaire*: Vol. 1, No. 1, 2018.

Yafet Y.W.Rissy, Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia, dan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1, 2019

Zakki Adhlyati & Ahmad. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2019, DOI: 10.22437/ujh.2.2.409-431

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

KUHPerdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

#### **SEMA**

SEMA 3 Tahun 2023 “Permohonan pernyataan pailit ataupun PKPU terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

#### **SEMINAR**

MD, Moh. Mahfud, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

#### **WEBSITE/INTERNET**

Badan Pemeriksa Keuangan, “Asas Actio Paulina dalam Perjanjian” <https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Asas-Actio-Pauliana-dalam-perjanjian.pdf> diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Hukum Online, Indra K. Wardani, “Piercing The Corporate Veil Pada Kepailitan

Anak Perusahaan ”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ipercinging-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan-lt5e3b94cd30fb2/#:~:text=Ketentuan%20Piercing%20the%20Corporate%20Veil,Sebagaimana%20telah%20kami&text=Akan%20tetapi%2C%20terdapat%20pengecualia%20terhadap,dengan%20piercing%20the%20corporate%20veil> diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

Hukum Online, Rifda Rudi, “Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana”, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidanalt52bdff\\_2508616/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidanalt52bdff_2508616/) diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

Hukum Online, Renata Christha Aulit, “Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdana?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kepailitan menurut KBBI”, <http://kbbi.web.id/pailit> diakses pada tanggal 11 Mei 2024